




<div><p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA DIVISI ADMINISTRASI</p><p>BAGIAN UMUM</p><p>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA</p></div>	NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1465
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	10 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	<div><div><b>Pt. KEPALA KANTOR WILAYAH</b>  <b>JONNY PESTA SIMAMORA</b> NIP 19731225 199303 1 001</div></div>
	NAMA SOP :	PENUNJUKAN PLH/PLT
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara 2. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Saksi Administrasi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 4. Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM 5. Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Karwil Kementerian Hukum dan HAM		1. mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan 2. Mengetahui tugas dan fungsi tata persuratan
<b>KETERKAITAN :</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
1. 2. 3.		1. Surat/Disposisi/Lembar Kerja/Rencana kerja dan Anggaran 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Jaringan Telekomunikasi
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>
Apabila data-data yang diperlukan tidak terkumpul tepat waktu maka pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan baik.		Di simpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENUNJUKAN PLH/PLT

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag. Umum	Kasubag WAI TU dan RT	JFUI JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	memerintahkan kadivmin untuk Membuat Surat Perintah Pth/Pt	MULAI					Pemohonan Penunjukan Pth/Pt	10	Disposisi	
2	memerintahkan kabag umum untuk menyiapkan konsep surat Perintah Pth/Pt						Disposisi	10	Disposisi	
3	memerintahkan kasubag Kepegawaian , TU dan RT untuk menyiapkan konsep surat Perintah Pth/Pt						Disposisi	20	Disposisi	
4	memerintahkan Pelaksana untuk menyiapkan konsep surat Perintah Pth/Pt						Disposisi	30	Disposisi	
5	mengetik konsep surat Perintah Pth/Pt					T		60	Konsep surat keputusan Penunjukan Pth/Pt	
6	mengoreksi dan memaraf konsep surat perintah kepada kabag umum					T		25	Konsep surat keputusan Penunjukan Pth/Pt	
7	mengoreksi dan memaraf konsep surat perintah kepada kadiv min					T		25	Surat Perintah Pth/Pt	
8	mengoreksi dan memaraf konsep surat perintah kepada kakanwil					T		20	Surat Perintah Pth/Pt	
9	menandatangani surat perintah Pelaksana Tugas /Pelaksana Harian	SELESAI					Surat Perintah Pth/Pt	10	Surat Perintah Pth/Pt	